

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, S., 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Bahreisy, Salim dan Abdullah Bahreisy, 2001, *Terjemah Al-Qur'an Al Hakim*, Sahabat Ilmu, Surabaya.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Djubaedah, Neng, 2012, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok.
- Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta.
- Mamudji, Sri, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mardiani. 2015, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia Cet. 2*. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Meleong, Lexy J., 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Liberte, Yogyakarta.
- Rafiq, Ahmad, 2014, *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siswoseodiro, Henry S. dan Dian, Veronica, 2008, *Mengurus Surat Kependudukan (Identitas Diri)*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- , dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sunggono, Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Surakhmad, Winarno, 1990, *Pengantar Pengetahuan Ilmiah*, Tarsito, Bandung.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta.

Makalah/Skripsi/Tesis

Ayun, Ro'fatul, 2019, "Perlindungan Atas Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Dalam Perkawinan Siri di Desa Aikmel, Lombok Timur", *Skripsi*: Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Jafar, Dede Wahidin, 2022, "Dampak Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Permendagri No. 9 Tahun 2015 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran", *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Haq, Muhammad Dliyaul, 2022, "Dampak Hukum Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap Legalitas Anak dalam Membuat Dokumen Kependudukan", *Skripsi*: Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta.

Ramdhani, Muhamad Amin, 2022, "Respons Tokoh Agama terhadap Keberadaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi di Kabupaten Lombok Tengah)", *Skripsi*: Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Mataram.

Riskiyah, Septi Putri, 2019, "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Pengganti Akta Nikah dalam Pembuatan Akta Kelahiran", *Skripsi*: S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.

Saragih, Rayani, 2017, "Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatatkan", *Tesis*: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara.

Sofie, Helmi Muti, 2022, "Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Kebijakan Afirmatif dalam Menyelesaikan Problematika Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Perlindungan Hukum dan Mashlahah Mursalah Al-Ghazali", *Tesis*: Program Studi Magister Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Zarkasyi, Muchtar, "Sejarah Peradilan Agama di Indonesia", *Makalah*, Materi Pendidikan Calon Hakim Angkatan III Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2018.

Jurnal

- Alifianti, Devi Sisti, Salsa, Amelia Nurul Izzah, Muhammad Fhaiz Habib Fhaizin Zudin, Arfiyanto Gunawan, Zakiyatul Ulya, 2023, “Degradasi Otoritas KUA sebagai Lembaga Pencatatan Perkawinan Pasca Berlakunya SPTJM dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016”, *Ma’Mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 04, No. 01.
- Aljarofi, Amanda Zubaidah, 2019, “Kategori Perkawinan Belum Tercatat dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis,” *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 9, No. 2, Hlm. 296–324.
- Arif, Anggraeni, 2015, "Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam", *Jurisprudentie*, Vol. 2, No. I.
- Marwin, 2014, "Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi", *Asas*, Vol. 6, No. 2.
- Maulana, Anas, 2022, “Pencatatan Perkawinan Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan”, *Islamic Law Jurnal Siyasah*, Vol. 07, No. 2.
- Rasyid, Chatib, 2012, “Anak Lahir di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina-Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No.46/ PUU-VII/2012”, *Jurnal Mimbar Hukum Dan Peradilan*. No.75.
- Rizkita, Karine dan Achmad Supriyanto, 2020, “Komparasi Kepemimpinan Pendidikan di Indonesia dan Malaysia dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan”, *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* Vol. 8, No. 2.
- Saphietry, Sastraseni dan Asep Ajidin, 2023, “Analisis Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga di Dinas Dindikcapil Kota Bukittinggi”, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (Jemb)*, Vol. 2, No. 1.
- Sofyan, Yayan, 2002, “Itsbat Nikah Bagi Perkawinan yang Tidak Dicatat Setelah Diberlakukan UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”, *Akham IV*, No. 8.
- Sri, Suwarni, 2017, “Kajian Yuridis Tentang Pelaksanaan Itsbat Nikah Menurut Hukum Positif Indonesia di Kabupaten Bantul”, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 2.
- Toif, 2018, “Implikasi Itsbat Nikah terhadap Status Perkawinan dan Anak dalam Kepastian Hukum”, *Aktualita*, Vo. 1, No. 2.

Wahyu Sururie, Ramdani, 2017, "Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XI, No. 2.

Zakaria, Endang dan Muhammad Saad, 2021, "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. XX No.2

Internet

Elfritri, Liza, 2013, "Dasar Hukum Pengajuan Itsbat Nikah bagi Pasangan Kawin Siri", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-pengajuan-itsbat-nikah-bagi-pasangan-kawin-siri-lt50a1e91040231>, diakses pada 24 Mei 2023

Fakrulloh, Zudan Arif, 2022, "Status 'Kawin Belu Tercatat' di Kartu Keluarga untuk Melindungi Anak dan Istri", <https://kumparan.com/zudan-arif-fakrulloh-fakrulloh/status-kawin-belum-tercatat-di-kartu-keluarga-untuk-melindungi-anak-dan-istri-1xwmr15BP0k/full>, diakses pada 09 Mei 2024.

Pengadilan Agama Lamongan, 2023, "Sidang Keliling Lebih Dekatkan Layanan Kepada Masyarakat", <https://pa-lamongan.go.id/Sidang-Keliling-Lebih-Dekatkan-Layanan-Kepada-Masyarakat>, diakses pada 04 Maret 2024

Permatasari, Erizka, 2023, "Langkah dan Prosedur Permohonan Itsbat Nikah" di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-dan-prosedur-permohonan-itsbat-nikah-lt4e67428a5d0ea/> diakses pada 13 Mei 2024

Sihotang, Swandy, 2019, "SPTJM: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Institut Kewarganegaraan Indonesia", <https://www.iki.or.id>, diakses pada 06 Mei 2024.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

Undang Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang

No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184).

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019 tentang Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013.